



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

Jalan Melur No 31 Singaraja

☎ : (0362) 32143 📷 : dagperinkopukm_buleleng

🌐 : disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya dan Karunianya sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai rencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Kinerja Aparatur menuju *Good Governance* dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja, dimana setiap unit organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi Pemerintahan Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2024, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng membuat Dokumen LKjIP ini sebagai salah satu bentuk dari tanggungjawab organisasai yang akuntabel dan transparan.

Diharapkan Dokumen LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng untuk dapat meningkatkan kinerjanya masing-masing yang akan datang.

Singaraja, 14 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii-iii
DAFTAR ISI.....	iv-v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii-viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1-2
1.2 Dasar Hukum.....	3-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	4-5
1.5 Isu Strategis.....	5
1.6 Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Startegis Perangkat Daerah	7-23
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23-25
2.3 Perjanjian Kinerja.....	25-33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	35
3.1.1 Rumus yang digunakan.....	35

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	38
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	38
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	41
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	132
BAB IV PENUTUP	115
4.1 Simpulan	115
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan Dinas.....	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas.....	12
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas.....	16
Tabel 2.4 Program Penunjang Dinas.....	21
Tabel 2.5 IKU Daerah Kabupaten Buleleng Periode 2023-2026.....	24
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP).....	28
Tabel 3.1 Rumus pengukuran kinerja.....	36
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas.....	39
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	42
Tabel 3.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1.....	43
Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategi 1.....	52
Tabel 3.6 Capaian Kinerja pada Sasaran Strategi 2.....	76
Tabel 3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	77
Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategi 2.....	79
Tabel 3.9 Capaian Kinerja pada Sasaran Strategi 3.....	84
Tabel 3.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	84
Tabel 3.11 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategi 3.....	91

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagai implementasi system akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan perencanaan strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada public pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan public terhadap jalannya pemerintahan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan dengan program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat

direalisasikan dengan Sangat Baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas dan staf Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disamping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan Sangat Baik.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 pada tahun berikutnya akan berusaha meningkatkan kinerja, berupaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Hal ini menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya dalam rangka mewujudkan *good governance* dan kebijakan pemerintah pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

LKjIP disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam dokumen LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA SKPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan kinerja Tahun 2024 yaitu tahun kedua Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Salah satu tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan didalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian sebagai Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng wajib untuk menyampaikan dokumen LKjIP sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan kewajiban dari Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pada Penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran secara spesifik pelaksanaan perencanaan pengawasan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas fungsi perencanaan yang dijalankan Dinas Perdagangan, Perindustrian

dan koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun yang akan datang

1.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan melalui proses pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan serta daya saing daerah.

Pembangunan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng diarahkan untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

menjadi pelaku Ekonomi yang Tangguh, Mandiri dan Profesional yang bertumpu pada Pemberdayaan Sumber Daya sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan dengan mekanisme pasar sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam menunjang kelangsungan usahanya serta sektor perdagangan yang mampu berdaya saing untuk meningkatkan nilai ekspor baik berupa olahan maupun perdagangan dan perindustrian sebagai menunjang komponen PDRB Kabupaten Buleleng berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha yang menjadi sumber pendapatan Daerah.

1.5 ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah instansi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing sektor perdagangan dan perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Masih rendahnya kemandirian daya saing Koperasi dan UMKM

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan susunan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah membuat dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Kinerja yang telah disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 – 2026 ditetapkan dengan Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

2.1.1 Pernyataan Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023 - 2026, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada

pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parahyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng berikut.

2.1.2 Pernyataan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia

yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi 3 : Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Misi 4 : Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

2.1.3 Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Mengacu pada RPD
Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026**

Misi Kepala Daerah	Tujuan SKPD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif 2. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera 3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat 4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 	<p align="center">Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing</p>

2.1.4 Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi Program/Kegiatan. Adapun tujuan beserta uraian Sasaran dan Indikator sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026**

No	Tujuan SKPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Per Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
			2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	6,22%	6,25%	6,27%
			3	Persentase UMKM Formal	20%	21%	22%	23%
			4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
			5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%
			6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	50-75%	50-75%	50-75%
			7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	100%

		Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5%	2-4%	2-4%	2-4%
			2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80-90	80-90	80-90

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2023 – 2026

No	Tujuan	Sasaran RPD	Strategi	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran SKPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
			Meningkatkan sebaran industri pengolahan		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	78,14%	6,22%	6,25%	6,27%
			Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM		Persentase UMKM Formal	20%	21%	22%	23%
					Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
			Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%
			Mengembangkan dan menguatkan		Persentase Sarana Distribusi	82%	50-75%	50-75%	50-75%

			kelompok pedagang/usaha informal		Perdagangan Yang Berkualitas				
					Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	100%
		Stabilisasi harga bahan pokok penting	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	Stabilisasi harga bahan pokok penting	Laju inflasi	2.5%	2-4%	2-4%	2-4%
					Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100%
				Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80-90	80-90	80-90

2.1.5 Program dalam Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Adapun program yang mendukung pelaksanaan pada urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,	Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kabupaten/Kota
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
			Fasilitasi Kemeduhan Perizinan Usaha Mikro
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
7	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasarana, SDM serta Desain dan Teknologi
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pembinaan terhadap Pengelola	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Perdagangan,	Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Sarana Distribusi Perdagangan
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
12	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
13	Program Perencanaan dan Pembangunan	Penyusunan, Penerapan dan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Industri,	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha secara Terintegritas berbasis Elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2.1.6 Program Penunjang

Program ini dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan dari program prioritas atau program wajib yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 Kabupaten Buleleng. Adapun program tersebut, antara lain :

**Tabel 2.4 Program Penunjang Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Buleleng Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarnan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng Periode 2023 – 2026

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama		Target	Formulasi/Cara Pengukuran
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	6,22%	$\frac{PI(t) - PI(t-1)}{PI(t-1)} \times 100\%$
		3	Persentase UMKM Formal	20%	Jumlah UMKM formal tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	Jumlah UMKM Naik Kelas tahun ini dibagi jumlah total

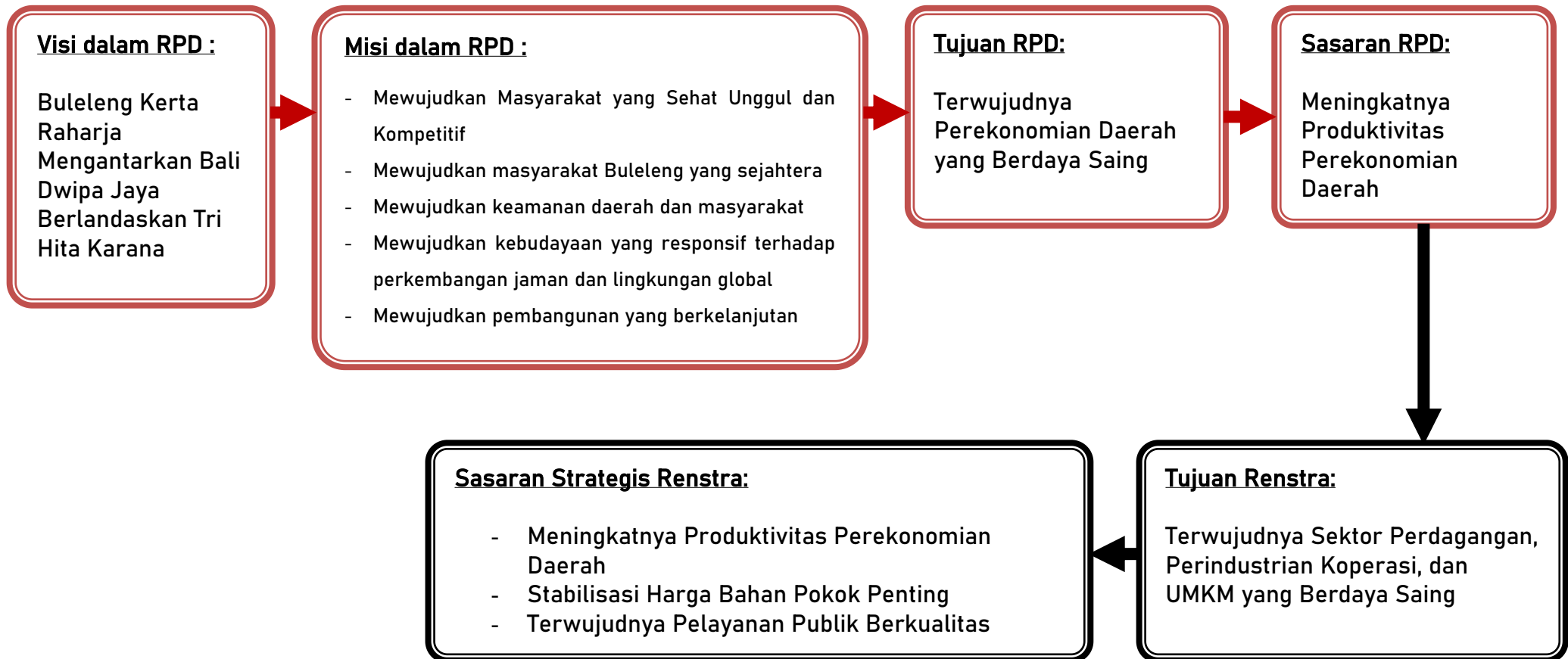
					UMKM x 100%
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	Jumlah koperasi aktif dan sehat tahun ini dibagi jumlah total koperasi x 100%
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	50-75%	Jumlah sarpras dengan kondisi baik dibagi jumlah total pasar
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi produk unggulan dibagi jumlah UMKM x 100%
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2-4%	Laju Inflasi (LI) = $\frac{(\text{IHK bulan ini} - \text{IHK bulan sebelumnya})}{(\text{IHK bulan sebelumnya} \times 100\%)}$
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	Laporan harga bapokting
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80-90	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Uraian}}{\text{Total uraian yang terisi}} \times \text{Nilai Poin Maksimal}$

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 mengacu pada Dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2023-2026. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026. Selanjutnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Berikut Penjabaran misi Kepala Daerah dalam Tujuan dan Sasaran RPD serta penjabarannya dalam Tujuan, dan Sasaran Renstra, sebagai berikut :

Bagan 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP)
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng Tahun 2024

• **Perjanjian Kinerja (PK) Induk dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Program	Anggaran		Ket
			Induk	Perubahan		Induk	Perubahan	
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1 Pertumbuhan ekonomi daerah	3,3%	3,3%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	98.200.668	82.741.771	APBD
		2 Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	6,22%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	208.757.006	462.009.006	APBD

		3	Persentase UMKM Formal	20%	20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.020.163.5 68	978.090.282	APBD
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,6%	Program Pengembangan UMKM	458.759.994	415.397.715	APBD
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,5%	78,5%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	65.444.579	50.546.839	APBD
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	61.973.081	55.592.914	APBD

						Koperasi			
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	268.950.000	287.478.500	APBD
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	73.004.934	66.604.290	APBD
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	50-75%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	61.839.420	59.547.420	APBD
						Program Standarisasi dan Perlindungan	219.720.026	225.109.192	APBD

						Konsumen			
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	56.925.400	55.628.388	APBD
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	69.178.470	62.074.470	APBD
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%	2-4%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	154.693.583	154.693.583	APBD
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%				
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,01%	80-90	Program Penunjang Urusan	8.705.997.868	9.371.622.375	APBD

			(IKM)			Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
TOTAL							11.523.608. 597	12.482.651.4 46	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang Buleleng diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, seluruh jajaran Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja


Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Penilaiannya mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

3.1.1 Rumus yang digunakan

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumus Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama		Target	Formulasi/Cara Pengukuran
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	6,22%	$\frac{PI(t) - PI(t-1)}{PI(t-1)} \times 100\%$
		3	Persentase UMKM Formal	20%	Jumlah UMKM formal tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	Jumlah UMKM Naik Kelas tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	Jumlah koperasi aktif dan sehat tahun ini dibagi jumlah total koperasi x 100%
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	50-75%	Jumlah sarpras dengan kondisi baik dibagi jumlah total pasar
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi produk unggulan dibagi jumlah UMKM x 100%
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2-4%	$Laju\ Inflasi\ (LI) = (IHK\ bulan\ ini - IHK\ bulan\ sebelumnya) / (IHK\ bulan\ sebelumnya) \times 100\%$
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	Harga bapokting

3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80-90	
---	--	---	----------------------------------	-------	---

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85% s/d 100%	:	Sangat Berhasil
70% s/d 84%	:	Berhasil
55% s/d 69%	:	Cukup Berhasil
<55%	:	Tidak Berhasil

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini berdasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		Target	Realisasi	%	Predikat	Kode
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3,11%	94,24%	Sangat Berhasil	
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	6.22%	6.22%	100%	Sangat Berhasil	
		3	Persentase UMKM Formal	21%	21%	100%	Sangat Berhasil	
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1.7%	1.7%	100%	Sangat Berhasil	
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	79.00%	78,76%	99,69%	Sangat Berhasil	
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	50-75%	63	84,00%	Sangat Berhasil	
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	Sangat Berhasil	

2	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	1	Laju inflasi	2-4%	1,93%	96,50%	Sangat Berhasil	
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%	Sangat Berhasil	
3	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80-90	89.60	99.55%	Sangat Berhasil	



3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan uraian Visi, Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki 1 Tujuan, 3 Sasaran Strategis, dan 10 Indikator Sasaran Strategis.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Adapun hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

Pada Sasaran Strategis ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 akan diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1 Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3,11 (*)	94,24%
		2 Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	6.22%	6.22% (*)	100%
		3 Persentase UMKM Formal	21%	21%	100%
		4 Persentase UMKM Naik Kelas	1.7%	1.7%	100%
		5 Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	79.00%	78,76%	99,69%
		6 Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	50-75%	63	84,00%
		7 Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%

Ket : (*) data sementara

Tabel 3.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3,11%	94,24%	✓ Meningkatnya jumlah UMKM. Jika jumlah UMKM semakin meningkat, maka semakin bergerak dan berkembang ekonomi lokal. Banyak tenaga kerja informal yang terserap dan potensi daerah dapat dikembangkan sehingga memiliki	✓ Belum optimalnya daerah dalam menggerakkan UMKM lokal	✓ Meningkatkan pelatihan kewirausahaan terhadap pelaku UMKM ✓ Meningkatkan akses permodalan terhadap UMKM dan Koperasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							nilai tambah. ✓ Meningkatnya permintaan produk-produk unggulan daerah		
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	6.22%	6.22%	100%	- Meningkatnya investasi, karena semakin tinggi tingkat investasi maka akan memperbesar modal yang digunakan dalam proses produksi. Maka kenaikan investasi akan	- Struktur industri masih belum kuat. Ini terbukti dari ketergantungan industri dalam negeri terhadap terhadap impor baik bahan baku maupun barang modal masih tinggi - Belum optimalnya	- Memperbaiki struktur industri menjadi lebih kuat, seperti menggunakan bahan baku/sumber daya alam yang ada di dalam negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>meingkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.</p> <p>Peningkatan ini akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja.</p> <p>- Meningkatnya jumlah unit usaha.</p> <p>Jumlah unit usaha merupakan jumlah perusahaan industry pengolahan yang beroperasi, yang</p>	<p>pemanfaatan sumber daya alam yang pada satu sisi justru memiliki keunggulan komparatif</p> <p>- Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produk dan modal,</p>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							dihitung dalam satuan unit usaha. Secara umum pertumbuhan unit usaha suatu sector pada suatu daerah akan menambah kontribusi terhadap PDRB.		
		3	Persentase UMKM Formal	21%	21%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pelaku UMKM yang belum paham mengenai perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Kurangnya inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan berkelanjutan melalui kolaborasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							motivasi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya - Meningkatnya kolaborasi program dalam pemberdayaan dan pengembangan (usaha UMKM)	untuk mengembangkan produk turunan dari potensi sumber daya alam - Kurangnya kemampuan dalam menjangkau akses pasar secara digital	program dengan pihak terkait untuk mengembangkan usaha UMKM baik dari sisi legalitas, produktivitas dan kualitas produk, kemasan dan pemasaran
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1.7%	1.7%	100%	- Regulasi yang memberikan kesempatan dan mendukung perkembangan	- Kurangnya kualitas SDM pelaku UMKM dalam mengakses informasi dan pemanfaatan	- Meningkatkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan serta

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							usaha UMKM - Kegiatan-kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, produksi, peningkatan kualitas produk, kemasan, branding produk dan pemasaran baik secara konvensional maupun secara digital	teknologi - Masih kurangnya pelaku UMKM dalam hal pemasaran dan branding produk yang dimiliki, sehingga produk umkm kurang dikenal luas di pasaran	akses jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	79.00 %	78,76%	99,69%	- Pelaksanaan RAT koperasi secara rutin dan tepat waktu	- Masih kurangnya keterampilan SDM koperasi dalam hal penyusunan laporan keuangan mengenai ekonomi akuntansi dan manajemen resiko	- Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan penyusunan laporan keuangan koperasi yang baik
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	50-75%	63%	84%	- Adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan.	- Belum adanya program kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan - Masih kurangnya kesadaran pengelola	- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi serta pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
								sarana perdagangan terhadap pemeliharaan sarpras perdagangan yang ada	- Mengajukan permohonan revitalisasi pasar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman,

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
									bersih dan tertata.
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan promosi produk unggulan daerah - Tingginya antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti promosi produk - Adanya kesadaran pelaku UMKM dalam memanfaatkan e-commerce untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya rasa kepercayaan usaha besar dalam menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pelaksanaan promosi produk unggulan daerah untuk menarik usaha besar bermitra dengan pelaku UMKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>memasarkan produknya lebih efisien dengan jangkauan global</p> <p>- Adanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal</p>		

Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	% koperasi aktif dan sehat	79,00 %	78,76 %	99,69 %	82.741.771	80.996.352	97,89 %
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					82.741.771	80.996.352	97,89 %
			- Pemberdayaan Peningkatan					82.741.771	80.996.352	97,89 %

			Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruksi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	% pertumbuhan industry pengolahan pada PDRB	6.22%	6.22 %	100%	462.009.006	403.440.407	87,32 %

			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	12 lap	12 lap	100%	462.009.006	403.440.407	87,32 %
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					372.418.170	403.440.407	86,10 %
			- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta					88.590.836	82.872.282	93,54 %

			Masyarakat							
		Persentase UMKM Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	% umkm formal	21%	21%	100%	978.090.282	920.328.112	90,09 %
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				978.090.282	920.328.112	90,09 %
			- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha	Jumlah dokumen	12 dok	12 dok	100%	3.320.000	3.187.200	96,00 %

				Mikro	penyediaan informasi permodalan UMKM						
			-	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					34.375.558	33.209.884	96,60 %
			-	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					59.000.000	57.995.913	98,30 %
			-	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Data UMKM Kabupaten Buleleng	12 dok	12 dok	100%	75.779.724	75.405.952	99,51 %

			-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Dokumen Data Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM	12 Lap	12 Lap	100%	805.615.000	750.529.163	93,16 %
		Persentase UMKM Naik Kelas		Program Pengembangan UMKM	% umkm naik kelas	1,7%	1,7%	100%	415.397.719	410.329.344	98,77 %
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		1,7%	1,7%	100%	415.397.719	410.329.344	98,77 %
			-	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		1,7%	1,7%	100%	415.397.719	410.329.344	98,77 %

			dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	% koperasi aktif dan sehat	79,00 %	78,76 %	99,69 %	50.546.839	48.597.209	96,14 %
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah					50.546.839	48.597.209	96,14 %

			Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
			- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota					50.546.839	48.597.209	96,14 %
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					55.592.914	54.862.528	98,69 %
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam					55.592.914	54.862.528	98,69 %

			Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					55.592.914	54.862.528	98,69 %
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM koperasi yang berkompeten	60 org	60 org	100%	287.478.500	257.255.925	89,50 %
			Pendidikan dan Latihan					287.478.500	257.255.925	89,50 %

			Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan - Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					287.478.500	257.255.925	89,50 %
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah dokumen koperasi yang memiliki legalitas formal	50 dok	50 dok	100%	66.604.290	64.329.948	96,60 %
			Penerbitan Izin					66.604.290	64.329.948	96,60

			Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							%
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang - Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan					66.604.290	64.329.948	96,60 %

			dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan sarana distribusi pasar yang kondisi baik, sedang dan rusak	20 dok	20 dok	100%	59.547.420	58.542.723	98,31 %
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					59.547.420	58.542.723	98,31 %
			Pembinaan dan Pengendalian - Pengelola Sarana Distribusi					59.547.420	58.542.723	98,31 %

			Perdagangan							
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	12 lap	12 lap	100%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					225.109.192	218.728.078	97,17 %
			- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah laporan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	12 lap	12 lap	100%	169.246.043	164.244.550	97,04 %
			- Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal	Jumlah laporan kesesuaian UTTP dan BDKT/B2	12 lap	12 lap	100%	55.863.149	54.483.528	97,53 %

				terhadap ketentuan yang berlaku						
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					55.628.388	54.236.733	97.50 %
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang					55.628.388	54.236.733	97.50 %
			- Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang					55.628.388	54.236.733	97.50 %
		Persentase Kemitraan UMKM	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	% kemitraan UMKM	100%	100%	100%	62.074.470	54.170.850	87,30 %
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan	Jumlah produk unggulan daerah yang	12 lap	12 lap	100%	62.074.470	54.170.850	87,30 %

			Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	dipromosikan						
			- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi produk unggulan daerah	12 lap	12 lap	100%	62.074.470	54.170.850	87,30 %
TOTAL								3.111.029.065	2.871.890.331	92,31 %

**Foto kegiatan Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas
Perekonomian Daerah**





FOTO KEGIATAN BID. STNP

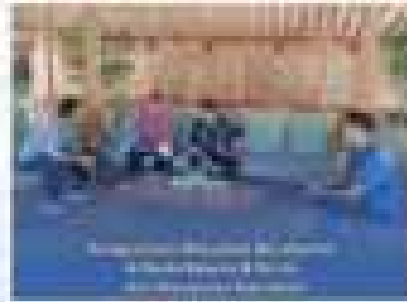




FOTO KEGIATAN BID. PP



3.3.2 Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

Pada Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 akan diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	- Laju Inflasi	2-4%	1,93%	96,50%
		- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%

Tabel 3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	1 Laju Inflasi	2-4%	1,93%	96,50%	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya monev ke lapangan terkait ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga akibat pendistribusian yang tidak berjalan secara efektif dan efisien - Terlaksananya OPM (Operasi Pasar Murah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan barang dan jasa yang melebihi pasokan yang tersedia, sehingga harga cenderung naik - Biaya produksi yang meningkat, seperti upah pekerja, harga bahan baku atau biaya produksi lainnya meningkat, 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemantauan ke lapangan sehingga pemerintah dapat mengatur harga komoditas penting yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini dapat dilakukan melalui intervensi pasar,
		2 Persentase Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%			

							<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan 	sehingga produsen menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan	pengelola stok, dan kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga - Meningkatkan OPM (Operasi Pasar Murah) di Kabupaten Buleleng
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	Laju Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju inflasi	2-4%	1,93%	96,50%	310.208.283	247.769.594	79,87%
			Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tngkat pasar kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok dan barang penting - Jumlah operasi pasar dan/atau pasar murah 	12 lap 10 lap	12 lap 10 lap	100% 100%	155.514.700	93.567.050	60,18%
			- Pemantauan harga dan stok barang					155.514.700	93.567.050	60,18%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu (1) kabupaten/kota							
		Persentase Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%	154.693.583	154.202.544	99,68%
			Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	- Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga	12 lap	12 lap	100%	154.693.583	154.202.544	99,68%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan						
			Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang - kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat					154.693.583	154.202.544	99,68%
TOTAL										

Foto Kegiatan Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting



3.3.3 Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

Pada Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 akan diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80-90	89,60	99,55%

Tabel 3.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80-90	89,60	99,55%	- Adanya kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan	- Masih kurangnya informasi produk pelayanan yang terdapat di Dinas Perdagangan,	- Meningkatkan pemberian pemahaman kepada masyarakat/ pengguna layanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<ul style="list-style-type: none"> - Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; - Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; - Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 	Perindustrian dan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng - Masyarakat cenderung memberikan respon yang normative ketika mengisi kuesioner	oleh petugas pelayanan public terkait setiap pelayanan yang ada pada Dinas - Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan unsur-unsur pelayanan yang

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<p>yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; - Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; - Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan 		<p>sudah dikategorikan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan upaya kemudahan pelanggan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<p>perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; - Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; - Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih , rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; - Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.		

Tabel 3.11 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80-90	89,60	99,59%	9.371.622.375	9.225.964.306	98,44%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban tepat waktu - Nilai AKIP yang baik 				221.594.917	211.517.988	95,45%
			- Penyusunan					196.414.013	190.289.288	96,88%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					25.180.904	21.228.700	84,30%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai				7.750.025.407	7.728.223.553	99,72%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				ketentuan						
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.564.826.789	7.546.880.574	99,76%
			- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					185.198.618	181.342.979	97,92%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran - Jumlah laporan	12 lap 12 lap	12 lap 12 lap	100%	117.613.925	94.172.670	80,07%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				pelayanan publik						
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor					9.423.678	5.052.720	53,62%
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					422.597	342.450	81,03%
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor					36.845.000	34.540.000	93,74%
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					6.600.000	5.254.000	79,60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			undangan							
			- Fasilitasi Kunjungan Tamu					12.966.000	11.649.000	89,84%
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					51.356.650	37.334.500	72,70%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	12 lap	12 lap	100%	1.115.007.926	1.038.713.845	93,16%
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat					303.925.273	302.974.683	99,70%
			- Penyediaan Jasa					271.178.920	214.607.915	79,14%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Penyediaan Jasa Peralatan - dan Perlengkapan Kantor					247.572.600	243.823.100	98,50%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					292.331.133	277.308.147	94,86%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	12 lap	12 lap	100%	167.380.200	153.336.250	91,61%
			- Penyediaan					65.180.200	52.951.250	81,23%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya					90.000.000	89.400.000	99,33%
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasaran					12.200.000	10.985.000	90,04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			pendukung gedung kantor atau bangunan kantor							
TOTAL								9.371.622.375	9.225.964.306	98,44%

3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi

3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024



➤ Tahun 2023

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	BELANJA OPERASI	12.875.271.341	12.121.808.493	94.15%
	- Belanja Pegawai	7.021.603.556	6.978.405.946	93.38%
	- Belanja Barang dan Jasa	5.758.667.785	5.048.402.547	87.66%
	- Belanja Hibah	95.000.000	95.000.000	100%
2	BELANJA MODAL	1.177.112.150	1.123.744.250	95.50%
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	959.117.150	908.413.050	94.71%
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.000.000	215.331.200	98.80%
TOTAL		14.052.383.491	13.245.552.743	94.30%

➤ Tahun 2024

No	Jenis	Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	BELANJA OPERASI	12.480.542.446	12.095.954.609	96,92%
	- Belanja Pegawai	7.564.826.789	7.546.880.574	99,76%
	- Belanja Barang dan Jasa	4.915.715.657	4.549.074.035	92,54%
2	BELANJA MODAL	2.109.000	1.900.000	90,09%
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.109.000	1.900.000	90,09%
TOTAL		12.482.651.446	12.097.854.609	96,91%

3.4.2 Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.371.622.375	9.225.964.306	98,44%	145.658.069	APBD
	Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.594.917	211.517.988	95,45%	10.076.929	APBD
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	196.414.013	190.289.288	96,88%	6.124.725	APBD
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.180.904	21.288.700	84,54%	3.952,204	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan				Keterangan
			Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.750.025.407	7.728.223.553	99,72%	21.801.854	APBD
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.564.826.789	7.546.880.574	99,76%	17.946.215	APBD
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.198.618	181.342.979	97,92%	3.855.639	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		117.613.925	94.172.670	80,07%	23.441.255	APBD
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	9.423.678	5.052.720	53,62%	4.370.958	APBD
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	422.597	342.450	81,03%	80.147	APBD
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.845.000	34.540.000	93,74%	2.305.000	APBD
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	6.600.000	5.254.000	79,60%	1.346.000	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Perundang-undangan					
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.966.000	11.649.000	89,84%	1.317.000	APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.356.650	37.334.500	72,69%	14.022.150	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.007.926	1.038.713.845	93,15%	76.294.081	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	303.925.273	302.974.683	99,68%	950.590	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.178.920	214.607.915	79,14%	56.571.005	APBD
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.572.600	243.823.100	98,48%	3.749.500	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.331.133	277.308.147	94,86%	15.022.986	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	167.380.200	153.336.250	91,61%	14.043.950	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan				Keterangan
			Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Pemerintahan Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.180.200	52.951.250	81,23%	12.228.950	APBD
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	90.000.000	89.400.000	99,33%	600.000	APBD
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan kantor	12.200.000	10.985.000	90,04%	1.215.000	APBD
B	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		66.604.290	62.632.448	94,03%	3.971.842	APBD
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk		66.604.290	62.632.448	94,03%	3.971.842	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	66.604.290	62.632.448	94,03%	3.971.842	APBD
C	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.546.839	48.597.209	96,14%	1.949.630	APBD
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan /Unit	50.546.839	48.597.209	96,14%	1.949.630	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.546.839	48.597.209	96,14%	1.949.630	APBD
D	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	55.592.914	54.862.528	98,68%	730.386	APBD
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.592.914	54.862.528	98,68%	730.386	APBD
	1 Pelaksanaan Penilaian	55.592.914	54.862.528	98,68%	730.386	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan				Keterangan
			Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
		Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
E	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		287.478.500	257.255.925	89,48%	30.222.575	APBD
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		287.478.500	257.255.925	89,48%	30.222.575	APBD
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	287.478.500	257.255.925	89,48%	30.222.575	APBD
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		82.741.771	80.996.352	97,89%	1.745.419	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.741.771	80.996.352	97,89%	1.745.419	APBD
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	82.741.771	80.996.352	97,89%	1.745.419	APBD
G	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	978.090.282	920.328.112	94,09%	57.761.170	APBD
	Pemberdayaan Usaha Mikro	978.090.282	920.328.112	94,09%	57.761.170	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	3.320.000	3.187.200	96,00%	132.800	APBD
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	34.375.558	33.209.884	96,60%	1.165.674	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	59.000.000	57.995.913	76,53%	1.004.087	APBD
4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	75.779.724	75.405.952	99,50%	373.772	APBD
5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha	805.615.000	750.529.163	93,16%	55.085.837	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan				Keterangan
			Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
		Mikro dan Kewirausahaan					
H	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		415.397.716	410.329.344	98,78%	5.068.372	APBD
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		415.397.716	410.329.344	98,78%	5.068.372	APBD
	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	415.397.716	410.329.344	98,78%	5.068.372	APBD
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		55.628.388	54.236.733	97,50%	1.391.655	APBD
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		55.628.388	54.236.733	97,50%	1.391.655	APBD
	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	55.628.388	54.236.733	97,50%	1.391.655	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
J	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	59.547.420	58.542.723	98,31%	1.004.697	APBD
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	59.547.420	58.542.723	98,31%	1.004.697	APBD
	1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	59.547.420	58.542.723	98,31%	1.004.697	APBD
K	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	310.208.283	247.769.594	79,87%	62.438.689	APBD
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	154.693.583	154.202.544	79,87%	491.039	APBD
	1 Koordinasi dan	154.693.583	154.202.544	79,87%	491.039	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan				Keterangan
			Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
		Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	155.514.700	93.567.050	60,16%	61.947.650	APBD
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	155.514.700	93.567.050	60,16%	61.947.650	APBD
L	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		225.109.192	218.728.078	97,16%	6.381.114	APBD
		Pelaksanaan Metrologi	225.109.192	218.728.078	97,16%	6.381.114	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	169.246.043	164.244.550	97,04%	5.001.493	APBD
	2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	55.863.149	54.483.528	97,53%	1.379.621	APBD
M	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	62.074.470	54.170.850	87,26%	7.903.620	APBD
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	62.074.470	54.170.850	87,26%	7.903.620	APBD
	1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	62.074.470	54.170.850	87,26%	7.903.620	APBD
N	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	462.009.006	403.440.407	87,32%	58.568.599	APBD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa anggaran	
	Penyusunan dan Evaluasi Reencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	462.009.006	403.440.407	87,32%	58.568.599	APBD
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	372.418.170	320.568.125	86,07%	51.850.045	APBD
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	89.590.836	82.872.282	92,50%	6.718.554	APBD
TOTAL		12.482.651.446	12.097.854.609	96,92%	384.796.837	APBD

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan total pagu sebesar **Rp. 12.482.651.446**, realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.097.854.609** atau % dengan realisasi fisik **100%**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan realisasi fisik terjadi efisiensi sebesar **Rp. 384.826.803** atau **3,08%**.

● Analisis Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan data capaian kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, adapun analisis dari efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

1. Anggaran

Anggaran dalam DPA Induk Tahun 2024 telah dilakukan revisi (penguranga/penambahan) terkait dengan efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi kegiatan berjalan. Data efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

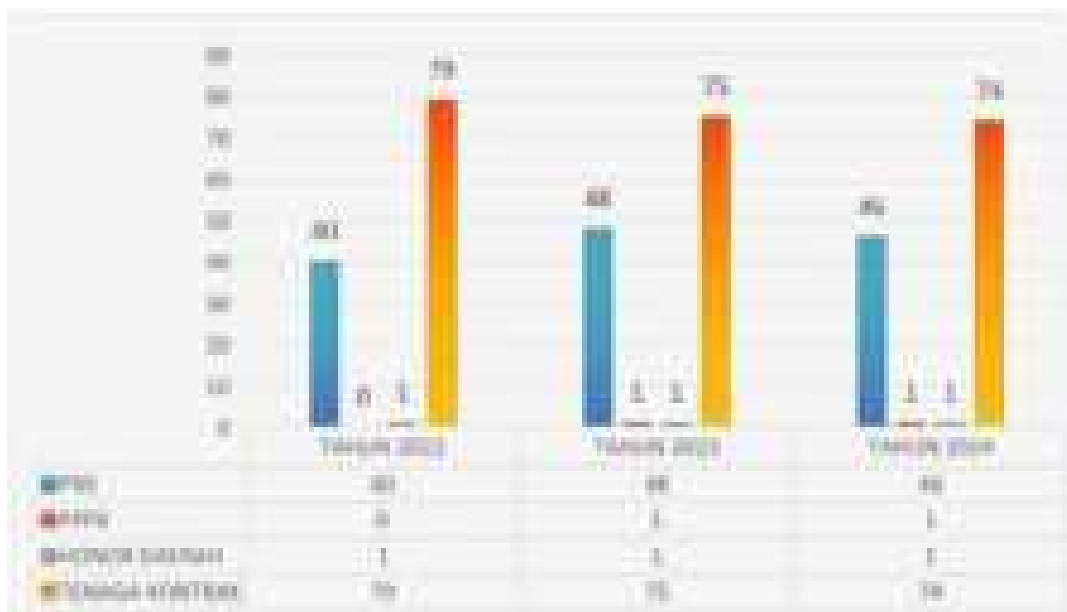
No	Jenis	Pagu (Rp.) TA 2024		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	BELANJA OPERASI	11.536.499.592	12.480.542.446	944.042.854	7.56%
	- Belanja Pegawai	6.960.685.135	7.564.826.789	604.141.654	7.99%
	- Belanja Barang dan Jasa	4.575.814.457	4.915.715.657	339.901.200	6.91%
2	BELANJA MODAL	2.109.000	2.109.000	0	0
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.109.000	2.109.000	0	0
TOTAL		11.538.608.592	12.482.651.446	944.042.854	

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang berstatus PNS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah sumber daya manusia baik yang berstatus PNS maupun Non PNS yang ada telah dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing pegawai.

Adapun hasil evaluasi internal capaian kinerja ASN yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada G-Kinerja maupun pada Perjanjian Kinerja yang disahkan/diketahui oleh Kepala Dinas. Untuk memonitoring pencapaian kinerja ASN apakah ada peningkatan ataupun penurunan, maka evaluasi ini dilaksanakan pada setiap triwulan untuk melihat grafik pencapaian sasaran kinerja ASN. Dalam mencapai suatu target sasaran kinerja tentu saja beberapa terdapat faktor pendukung/pendorong, faktor penghambat serta solusi/tindak lanjut yang dihadapi saat melaksanakan suatu program/kegiatan dilapangan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu target sasaran kinerja yang dimiliki oleh masing-masing pegawai ASN.

Total Sumber Daya Manusia Disdagperinkopukm TA 2022 - 2024



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja menuju *Good Governance* dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kewenangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024, secara umum sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

4.2 Langkah Perbaiki ke Depan

Pencapaian kinerja urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik dalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Adapun permasalahan serta langkah/tindak lanjut yang harus diambil dalam pencapaian indikator dimasa mendatang antara lain :

No	Permasalahan	Tindak lanjut
1	Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga,	➤ Melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang, pendataan UTTP serta pembinaan dan

	sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama dalam hal tertib ukur, penjualan produk illegal dan produk olahan makanan yang membahayakan kesehatan.	penyuluhan tertib niaga secara berkelanjutan. ➤ Melaksanakan pembinaan pedagang secara berkelanjutan.
2	Masih kurangnya pemahaman pelaku industry mengenai permohonan izin industry dan standar produk yang dihasilkan	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industry di masing-masing sentra industry yang ada di Kabupaten Buleleng
3	Masih kurangnya kreatifitas para pengrajin dalam pengolahan bahan maupun pengemasan produk	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan-pelatihan kepada pengrajin
4	Masih kurangnya pemahaman pengurus koperasi mengenai tata cara permohonan NIB	Melaksanakan pendampingan secara berkala kepada masing-masing pengurus koperasi
5	Masih adanya koperasi yang belum terakses permodalannya dari LPDB, Perbankan, dan Lembaga keuangan lainnya	Melaksanakan fasilitasi akses permodalan melalui kegiatan temu mitra
6	Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai tata cara memperoleh NIB	Memberikan sosialisasi dan pendampingan secara berkala kepada pelaku usaha mengenai tata cara memperoleh NIB
7	Masih kurangnya kesadaran pengelola sarana perdagangan terhadap pemeliharaan sarpras perdagangan yang ada	Meningkatkan pengawasan, sosialisasi serta pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741014 199311 1 001

